

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



TRIWULAN III TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**


**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar
Pada Hari Rabu, 01 Oktober 2025

Top Management,


Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005

Sekretaris Tim Survei,


NURIYA AWAD, S.H.
NIP. 19750330200002002

Ketua Tim Survei,


DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H.
NIP. 197107211999032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 Oktober 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	9
C. Prinsip	9
D. Rencana Kerja Pelaksanaan	10
E. Tahapan Pelaksanaan	10
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	12
A. Metode Survei	12
B. Teknik Pengumpulan Data	12
C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat	13
D. Teknik Analisis Data	14
BAB III PROFIL RESPONDEN	16
A. Umur	16
B. Jenis Kelamin	17
C. Pendidikan Terakhir.....	18
D. Pekerjaan Utama.....	19
BAB IV HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	20
A. Kesesuaian Persyaratan	21
B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.....	23
C. Waktu Pelayanan	24
D. Biaya/Tarif.....	25
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.....	26
F. Kompetensi Pelaksana.....	27
G. Perilaku Pelaksana.....	28

H.	Sarana dan Prasarana.....	29
I.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	30
J.	Analisa dan Tindak Lanjut	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		31
A.	Kesimpulan	31
B.	Rekomendasi.....	32
RUJUKAN:		34
LAMPIRAN-LAMPIRAN.		35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan15

No. Tabel	Halaman
1. Kategori Mutu Pelayanan	6
2. Responden Menurut Karakteristik Umur	7
3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin.....	7
4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	8
5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama...	8
6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus	9
7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Kesesuaian Persyaratan	10
8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme dan Prosedur	11
9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan	12
10. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Biaya/Tarif.....	13
11. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	14
12. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana.....	15
13. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	16
14. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana.....	17
15. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	28

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Kesesuaian Persyaratan	10
2. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme dan Prosedur	11
3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan	12
4. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Biaya/Tarif.....	13
5. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	14
6. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana.....	15
7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	16
8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana.....	17
9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban, dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan

media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus . Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan Juli s/d September 2025.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kualitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: masyarakat pengguna pengadilan, Kepolisian, Advokad/Pengacara, dll. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan minimal **30 orang** yang diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie. 30 orang** tersebut diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode secara elektronik melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id> dimana didalamnya terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data Responden

Berupa isian data pribadi responden

2. Jenis Layanan

Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden

3. Kuisisioner

Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh unit layanan publik. Kuesioner atau angket pada Aplikasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Angket tersebut terdiri dari **9** indikator dengan menambahkan Indikator Transparansi Pelayanan guna mendapatkan respon masyarakat terhadap pembangunan zona integritas yang bebas korupsi. Dalam hal ini ruang lingkup yang dilakukan survei, yaitu: (1) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (2) Kesesuaian Persyaratan; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Perilaku Pelaksana; (7) Sarana dan Prasarana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; (9) Kompetensi Pelaksana;

4. Kesan dan Pesan

Berupa isian bebas kesan dan pesan memuat instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka.

Tahapan pengisian Survei Elektronik ini disajikan pada lampiran Laporan ini

C. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Ruang lingkup/indikator pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, antara lain:

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Kompetensi Pelaksana

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun

pensekorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,00
2.	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3.	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

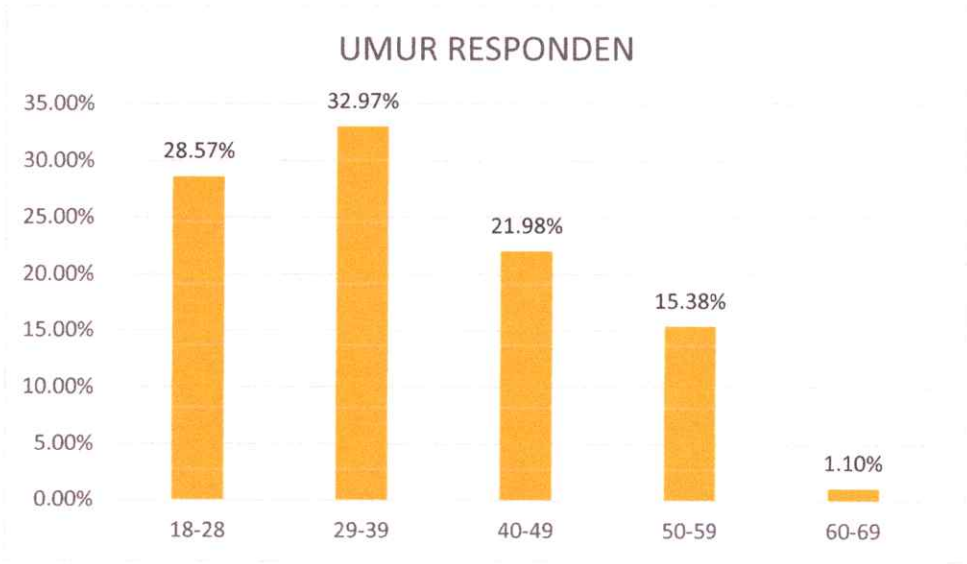
BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Umur.

No	Usia	Frekuensi	%
1	18-28	26	28.57%
2	29-39	30	32.97%
3	40-49	20	21.98%
4	50-59	14	15.38%
5	60-69	1	1.10%
Jumlah		91	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 Tahun (32,97%).

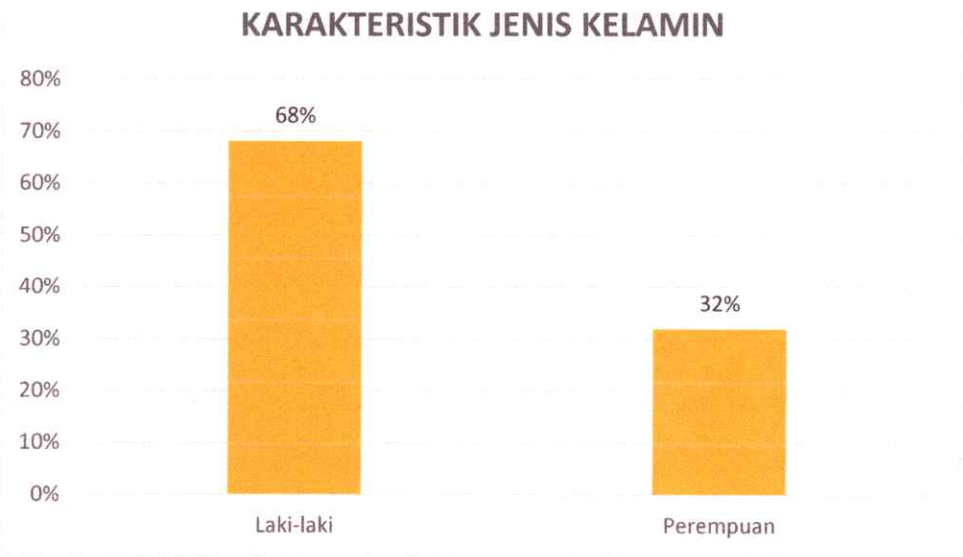


B. Jenis Kelamin

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	62	68%
2	Perempuan	29	32%
Jumlah		91	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang (68%).

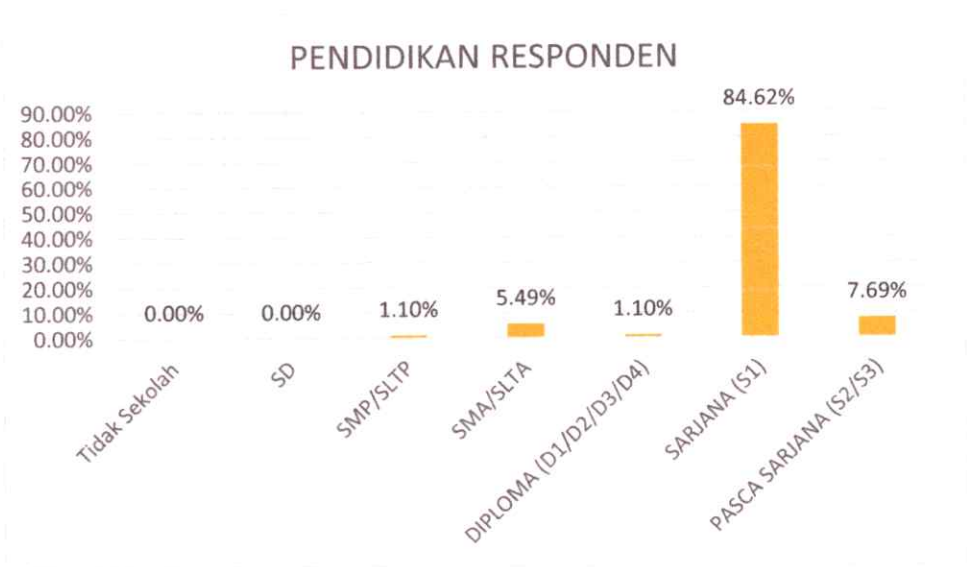


C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4 Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0.00%
2	SD	0	0.00%
3	SMP/SLTP	1	1.10%
4	SMA/SLTA	5	5.49%
5	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	1	1.10%
6	SARJANA (S1)	77	84.62%
7	PASCA SARJANA (S2/S3)	7	7.69%
Jumlah		91	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir S1 sebanyak 77 orang (84,62%).



D. Pekerjaan Utama

Tabel 5 Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	PEKERJAAN	Frekuensi	%
1	PNS	5	5.49%
2	TNI	0	0.00%
3	Polri	1	1.10%
4	Swasta	4	4.40%
5	Tenaga Kontrak	0	0.00%
6	Wirausaha	1	1.10%
7	Lainnya	80	87.91%
Jumlah		91	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama Lainnya sebanyak 80 orang (87,91%).

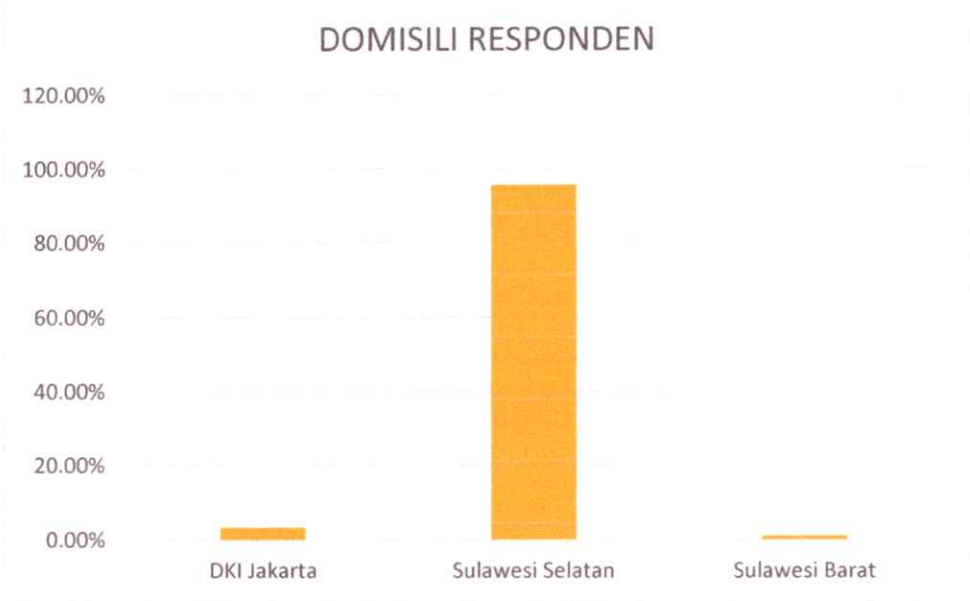


E. Domisili Responden

Tabel 6 Responden Menurut Karakteristik Domisili

No	Domisili	Frekuensi	%
1	DKI Jakarta	3	3.30%
2	Sulawesi Selatan	87	95.60%
3	Sulawesi Barat	1	1.10%
Jumlah		91	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berdomisili di Sulawesi Selatan sebanyak 87 orang (95,60%).



BAB IV
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 34 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **98,87% atau pada nilai 3,95** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 88,31 – 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 90%. Hasil tersebut telah mencapai sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 7
Rata-Rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Persyaratan Pelayanan	NRR	IKM Perunsur	Ket.
1	Kesesuaian Persyaratan	3,967	99,175%	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,956	98,9%	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,934	99,5%	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,956	98,9%	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,945	98,625%	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,956	98,9%	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,956	98,9%	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,956	98,9%	Sangat Baik
9	Penanganan Masukan dan Saran	3,967	99,175%	Sangat Baik

A. Kesesuaian Persyaratan

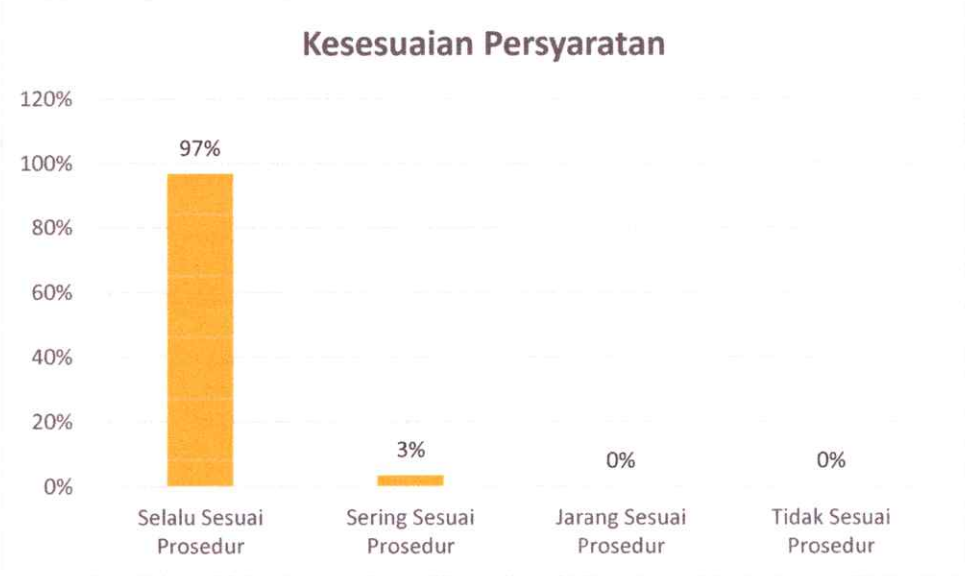
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,967** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Kesesuaian persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kesesuaian persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Kesesuaian Persyaratan

No.	Kesesuaian Persyaratan	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	4	88	97%
2	Sesuai Prosedur	3	3	3%
3	Kurang Sesuai Prosedur	2	0	0%
4	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Ruang Lingkup: Persyaratan

B. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

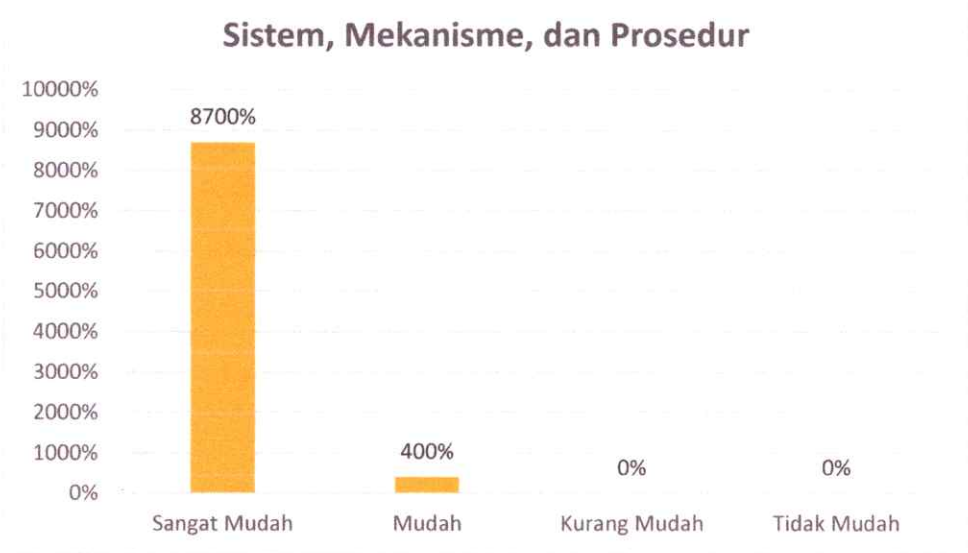
Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan sesuai dengan sop layanan bagi pemberi dan penerima pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sistem, Mekanisme dan Prosedur berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sistem, Mekanisme dan prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar
Ruang Lingkup: Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Mudah	4	87	87
2	Mudah	3	4	4
3	Kurang Mudah	2	0	0
4	Tidak Mudah	1	0	0
Jumlah			91	91

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar
Ruang Lingkup: Prosedur

C. Waktu Pelayanan

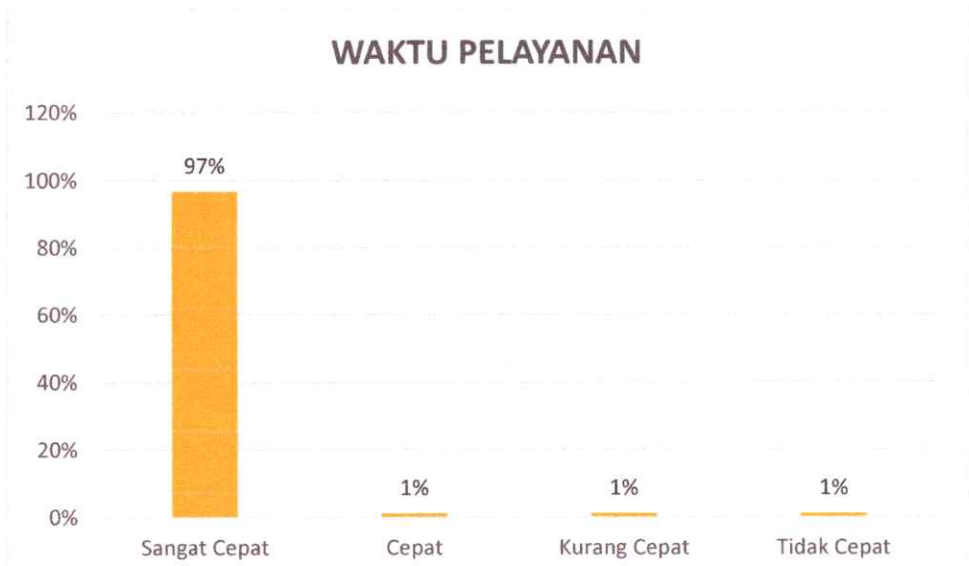
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,934** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori kurang baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Negeri Kelas IA Khusus Makassar
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No.	Waktu Pelayanan	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Cepat	4	88	97%
2	Cepat	3	1	1%
3	Kurang Cepat	2	1	1%
4	Tidak Cepat	1	1	1%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

D. Biaya/Tarif

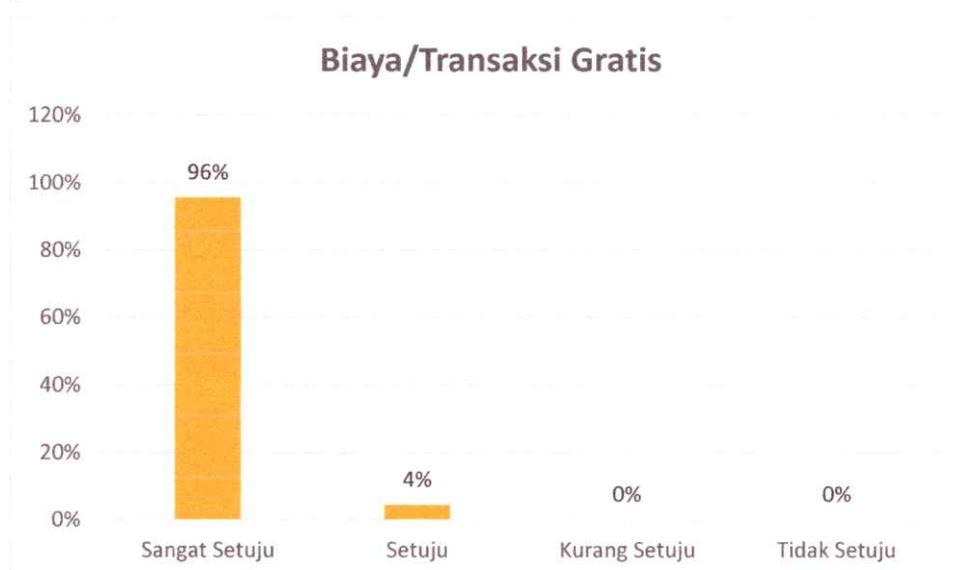
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Biaya/Tarif Gratis	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Setuju	4	87	96%
2	Setuju	3	4	4%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

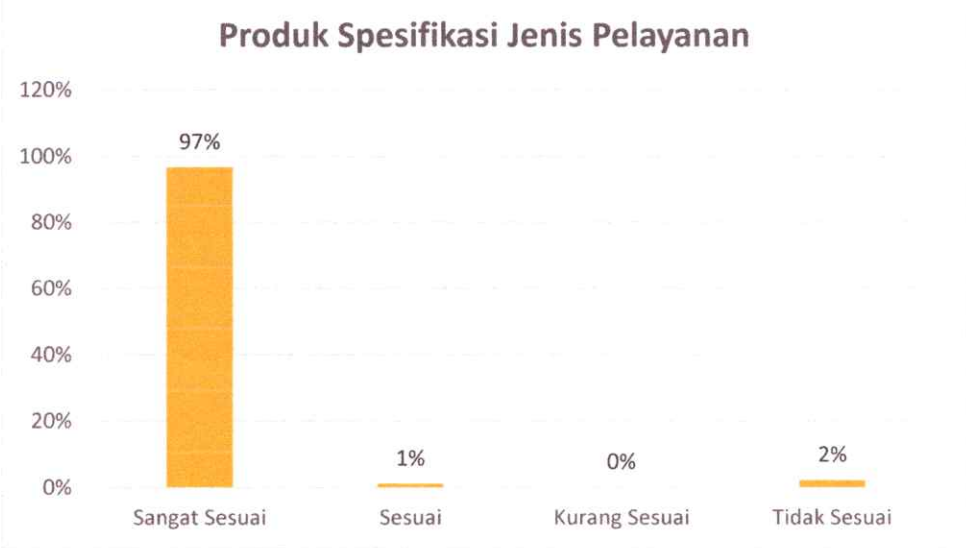
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,945** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Sesuai	4	88	97%
2	Sesuai	3	1	1%
3	Kurang Sesuai	2	0	0%
4	Tidak Sesuai	1	2	2%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana

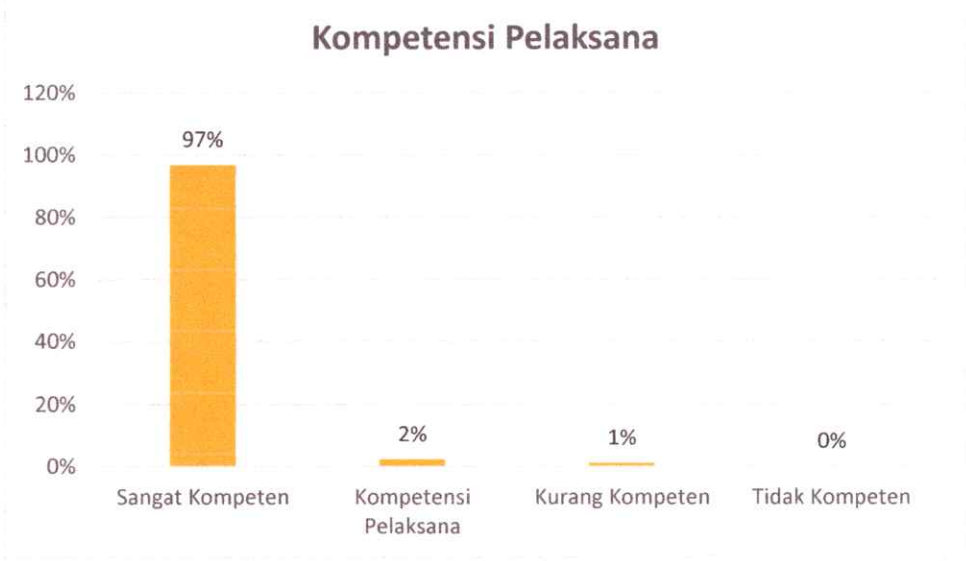
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Kompetensi Pelaksana	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Kompeten	4	88	97%
2	Kompetensi Pelaksana	3	2	2%
3	Kurang Kompeten	2	1	1%
4	Tidak Kompeten	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana

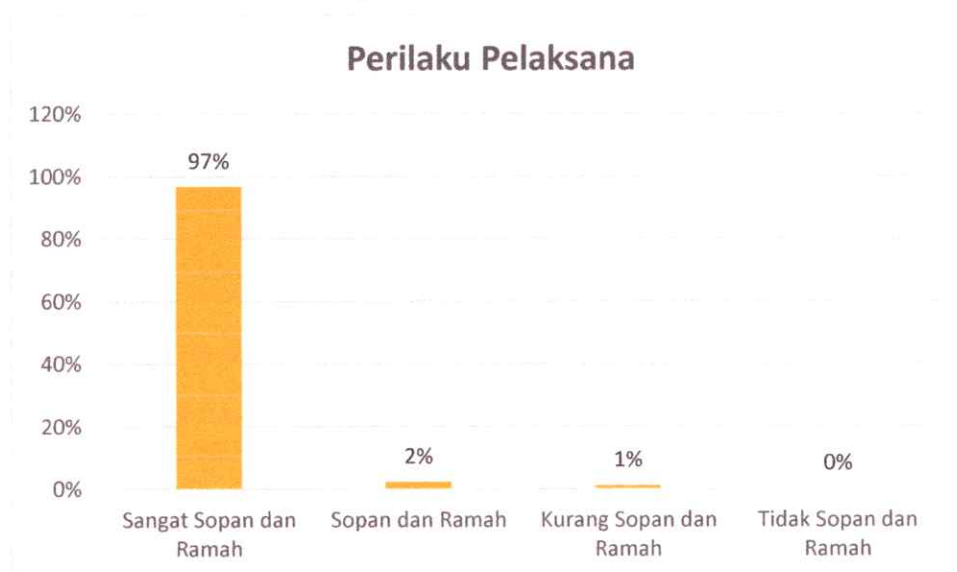
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Perilaku Pelaksana	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Sopan dan Ramah	4	88	97%
2	Sopan dan Ramah	3	2	2%
3	Kurang Sopan dan Ramah	2	1	1%
4	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

H. Sarana dan Prasarana

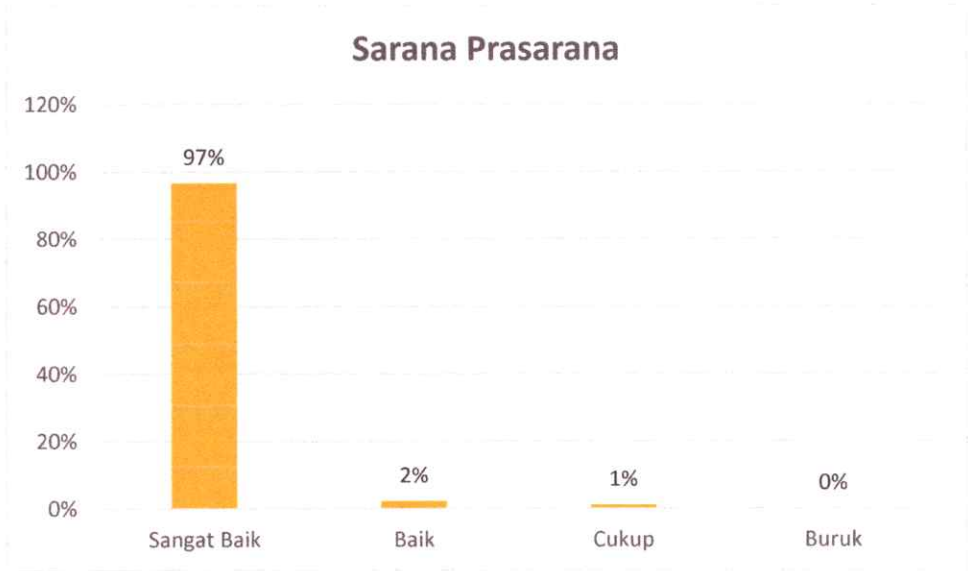
Sarana dan Prasarana merupakan penunjang pelayanan kepada Masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No.	Sarana Prasarana	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Baik	4	88	97%
2	Baik	3	2	2%
3	Cukup	2	1	1%
4	Buruk	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

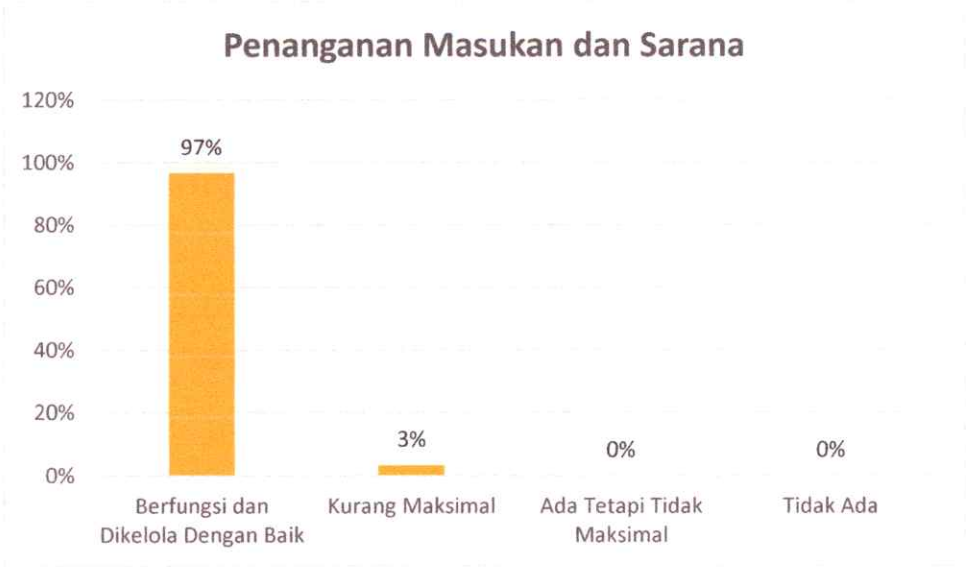
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,956** berada pada **interval skor 3,5324 – 4,00** kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

No.	Penanganan Masukan dan Saran	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Berfungsi dan Dikelola Dengan Baik	4	88	97%
2	Kurang Maksimal	3	3	3%
3	Ada Tetapi Tidak Maksimal	2	0	0%
4	Tidak Ada	1	0	0%
Jumlah			91	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Makassar Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **98,87%** dan pada skala 4 sebesar **3,95** berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini belum sesuai dari target pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan ditahun 2025 sebesar 90%. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,967** berada pada kategori **SANGAT BAIK**
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,956** berada pada kategori **SANGAT BAIK**
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,934** pada kategori **SANGAT BAIK**
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,956** pada kategori **SANGAT BAIK**
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,945** pada kategori **SANGAT BAIK**
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,956** pada kategori **SANGAT BAIK**
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,956** pada kategori **SANGAT BAIK**
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,956** pada kategori **SANGAT BAIK**

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,967** pada kategori **SANGAT BAIK**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Spesifikasi Jenis Layanan, Spesifikasi Sitem Mekanisme, dan Prosedut Pelayanan, dan Spesifikasi Kesesuaian Persyaratan.

Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Waktu Pelayanan (U3)	3,934	360
2	Indikator Kesesuaian Persyaratan (U1)	3,967	361
3	Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan (U2)	3,956	360

Kesan dan Pesan Responden:

No.	Nama	Pekerjaan	Kesan dan Pesan
1	RR	Lainnya	Pengadilan Negeri Makassar sangat peduli dengan pelayanan pada setiap orang yang telah membutuhkan bantuan hukum sesuai dengan keluhan masyarakat pada umumnya.
2	Faita	Lainnya	Petugas ramah dan informatif, menjalankan prosedur dengan baik.
3	Akhmad Fauzan	Lainnya	Pelayanan PTSP memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat baik dari segi informasi maupun pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Sarana Prasarana. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik akan tetapi berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

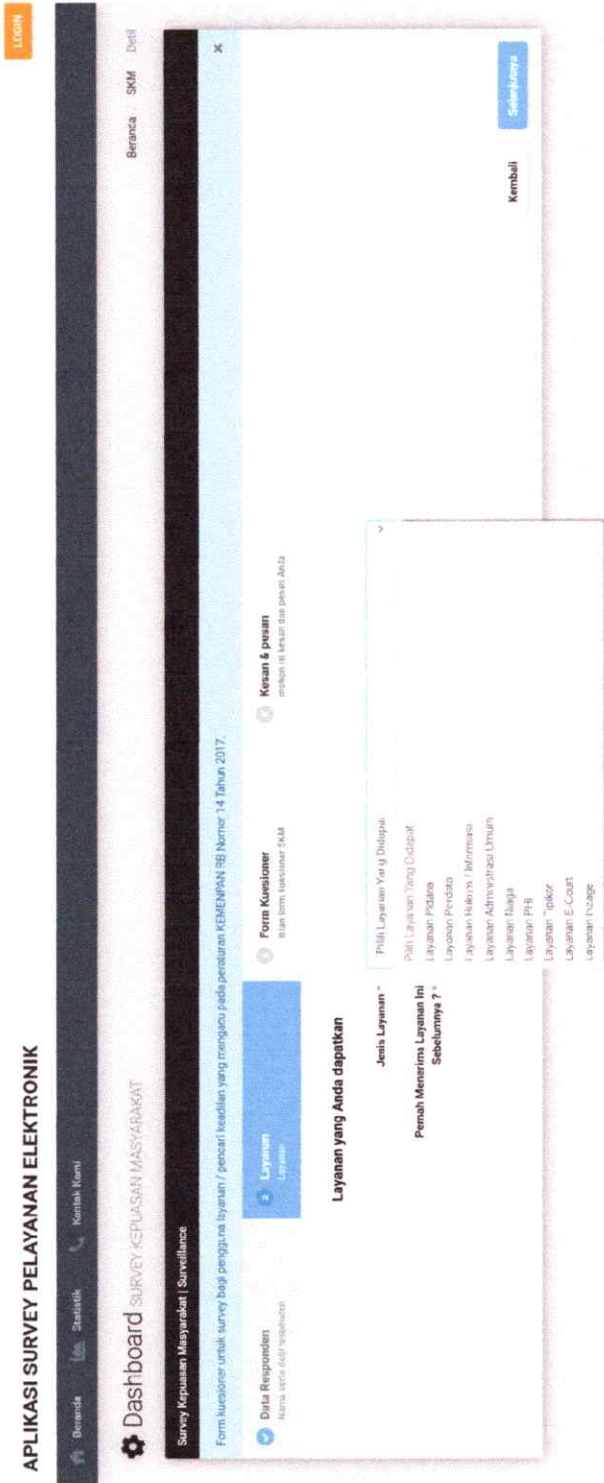
Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

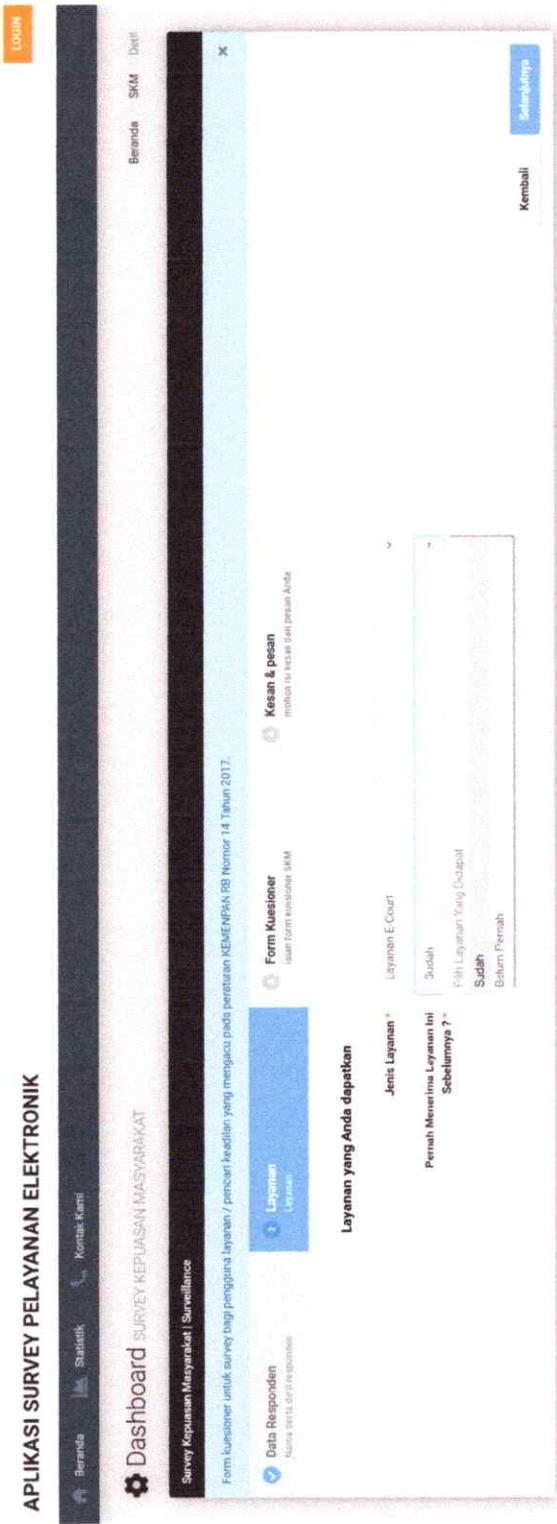
Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.





APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

LOGOUT

Beranda

Statistik

Kontak Kami

Dashboard

Beranda

SWM

Daftar

Survey Kepuasan Masyarakat / Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencanangan hasil yang mengacu pada peraturan KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Data Responden

Survei untuk 2025

Layanan

Layanan

Form Kuesioner

Survei untuk 2025

Kesan & pesan

Survei untuk 2025

1

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

2

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?

Tidak Mudah

Kurang Mudah

Mudah

Sangat Mudah

3

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?

Tidak Cepat

Kurang Cepat

Cepat

Sangat Cepat

4

Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS ?

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Setuju

Sangat Setuju

5

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

6

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?

Tidak Kompeten

Kurang Kompeten

Kompeten

Sangat Kompeten

7

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?

Tidak Sopan dan Ramah

Kurang Sopan dan Ramah

Sopan dan Ramah

Sangat Sopan dan Ramah

8

Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?

Buruk

Cukup

Baik

Sangat Baik

9

Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?

Tidak ada

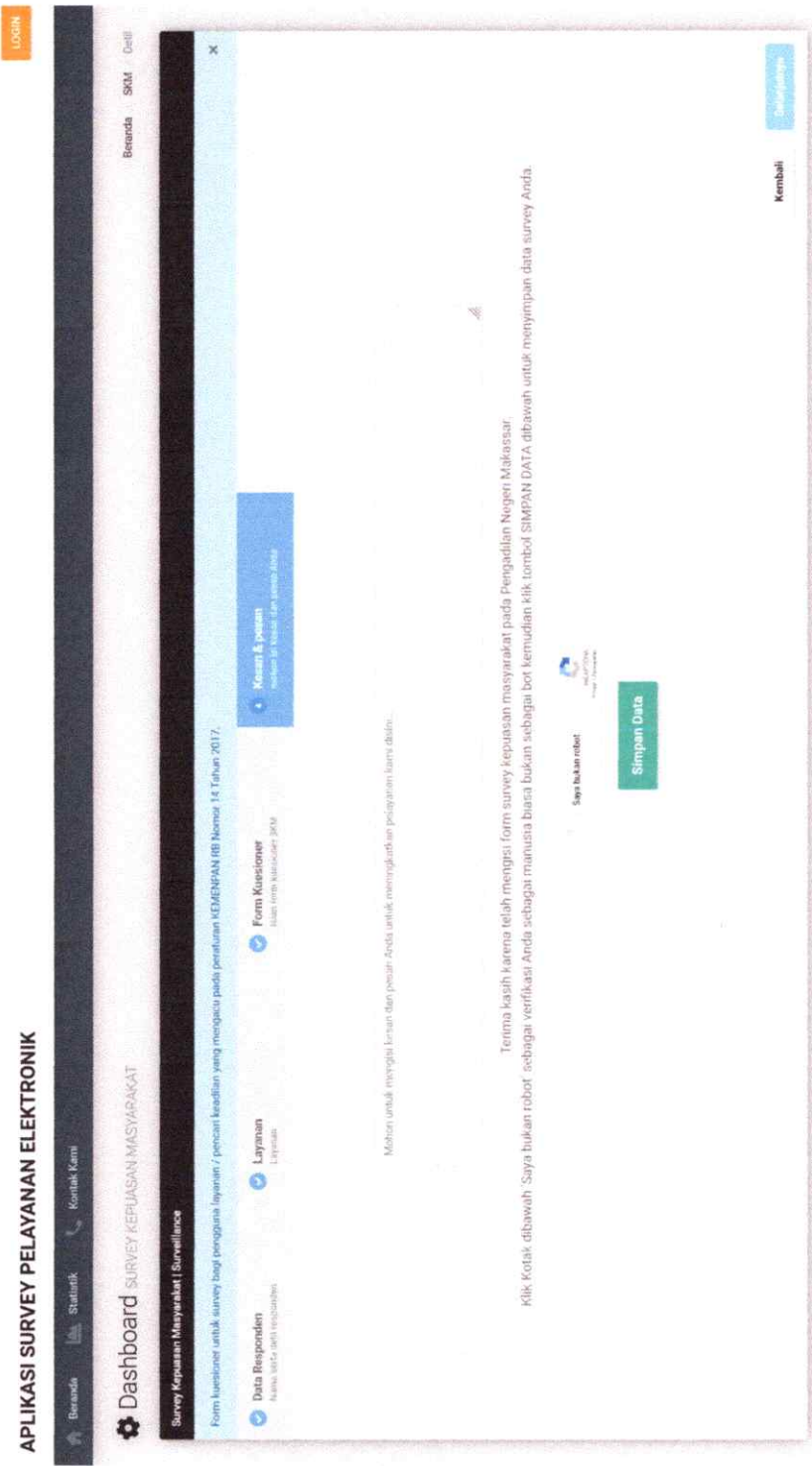
Ada tetapi tidak dapat diakses

Kurang maksimal

Berfungsi dan dikelola dengan baik

Kembali

Selanjutnya





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jln. R. A. Kartini No. 16/23 KOTAMAKASSAR
SULAWESI SELATAN
<http://www.pn-makassar.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,95 / 98,87%

Jumlah	91 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 62	
	PEREMPUAN : 29	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 1	S1 : 77
	SMU : 5	S2 : 6
	Diploma 1 : 0	S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 5	SWASTA : 4
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 1
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 81	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	3,934
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?	3,945
3. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	3,956

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

13 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR